

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

*Analysis Of The Effect Of Applying Good Governance To The Performance
Of Village Financial Management In The Lengayang
Sub-District Of The Pesisir Selatan Regency*

Wahidul Ikhsani Putra; Delvianti; Citra Liza
Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti Padang
E-mail: ikhsandrew17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan prinsip *Good Governance* yang diproxykan dengan prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip partisipasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan secara parsial. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari angket-angket/kuesioner yang disebarkan kepada responden-responden yang menjadi sampel pada penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini merupakan data primer. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perangkat-perangkat Nagari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah 118 orang perangkat Nagari. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan diperoleh sampel sebanyak 62 orang perangkat Nagari. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dan pengujian hipotesisnya menggunakan uji *t* (parsial). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* yang diproksikan prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip partisipasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci : *Good Governance*, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

ABSTRACT

*This study aims to determine whether the application of the principles of good governance proxied by the principle of transparency, the principle of accountability, and the principle of participation have a significant effect on the performance of village financial management in Lengayang Sub-district, Pesisir Selatan Regency partially. The type of data used in this study is qualitative data sourced from questionnaires / questionnaires distributed to respondents who were sampled in this study. The data source in this study is primary data. The population in this study were all Village officials in Lengayang Sub-district, Pesisir Selatan Regency, totaling 118 Village officials. The sampling technique uses purposive sampling technique in accordance with predetermined criteria. Based on predetermined criteria obtained a sample of 62 Village officials was obtained. The analytical method used in this study is simple linear regression analysis and hypothesis testing using *t* test (partial). The results of this study indicate that the application of the principle of Good Governance which is proxied by the principle of transparency, the principle of accountability, and the principle of participation significantly influence the performance of village financial management.*

Keywords: *Good Governance, Transparency, Accountability, Participation, Village Financial Management Performanc*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam tiap daerah Kabupaten/Kota terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut Desa dan Kelurahan (Hanif Nurcholis, 2011).

Desa merupakan suatu unit organisasi pemerintah yang bisa berhubungan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan. Hal ini menjadikan desa memiliki peranan penting dan strategi khususnya dalam bidang pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam menerapkan otonomi desa, desa perlu diberikan kewenangan dan dana-dana yang lebih besar disertai sarana-prasarana yang memadai. Seperti dengan adanya pemberian dana untuk setiap desa melalui alokasi dana desa. Peningkatan aliran dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor desa dalam pembangunan Negara.

Dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya diperlukan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat pencapaian desa dalam memberikan pelayanan publik yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Mahsun, 2014). Pengukuran kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dapat diukur dengan konsep "*Value for money*". *Value for money* merupakan konsep pengukuran kinerja pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efektivitas, dan efisiensi (Mardiasmo, 2009).

Good Governance merupakan pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, kohesifitas sosial dan masyarakat. *UNDP* menilai bahwa *Good Governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yakni pemerintah (*Government*), rakyat (*Citizen*) atau *Civil society*, dan wirausahawan (*Business*) yang berada di sektor swasta (Muhammadong, 2017).

Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prinsip *Good Governance* dimana Prinsip-prinsip *Good Governance* yang digunakan menurut *World Bank* (Mardiasmo, 2009) yang meliputi, Prinsip akuntabilitas (*Accountability*) merupakan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan kebijakan serta fungsi-fungsi yang dijalankan pemerintah terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip transparansi (*Transparency*) merupakan mewajibkan adanya suatu informasi yang diberikan kepada semua pihak secara terbuka, tepat waktu, serta jelas atas semua tindakan dan kewajiban yang diambil oleh pemerintah. Prinsip partisipasi (*Participation*) merupakan memberikan setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung,

Penelitian terdahulu yang terkait dalam penerapan prinsip *Good Governance* terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Rino Pandhu Wibowo (2018) dengan judul "Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus pada Pemerintahan Desa

Banjararum. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa diterapkannya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pengendalian internal membuat kinerja Pemerintahan Desa Banjararum lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Hal ini sesuai dengan salah satu dampak positif yang terjadi apabila prinsip *Good Governance* diterapkan (dalam BAPPENAS, 2007) yaitu terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang ingin diteliti adalah “Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan?”.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat menetapkan dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya dan ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri (Amin Suprihatini, S.Pd., 2018).

Keuangan Desa

Keuangan desa adalah Penyelenggaraan desa yang berhubungan dengan uang dalam rangka untuk memenuhi hak dan kewajiban desa (Hanif Nurcholis, 2011).

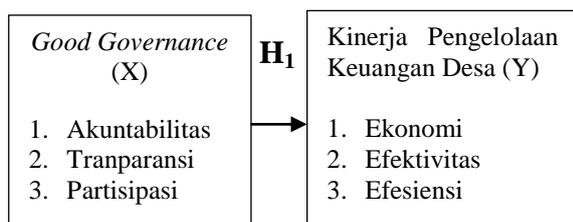
Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2014).

Good Governance

Good Governance adalah peyelegaraan suatu manajemen yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran.

Kerangka Konseptual



H₁: Diduga Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Data kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini, data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2015). Data kuantitatif dalam penelitian ini bersumber dari jawaban kuesioner yang diberikan kepada perangkat Nagari yang berada di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan survey langsung di kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan sebagai objek penelitian. Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan cara pengamatan langsung, penyebaran kuesioner yang diadopsi dari penelitian terdahulu.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Nagari yang ada di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah sebanyak 118 orang perangkat nagari.

Sampel

Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini didasarkan pada metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel diambil secara tidak acak dan dipilih berdasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu. Alasan mengambil *purposive sampling* adalah karena peneliti menggunakan kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel.

Adapun kriteria perangkat Nagari yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Nagari yang wajib mengetahui dan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Kepala bagian dari masing-masing perangkat Nagari.

Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator
1.	<i>Good Governance</i> (X)	- Akuntabilitas - Transparansi - Partisipasi Sumber : Mardiasmo (2018)
2.	Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	- Ekonomis - Efisiensi - Efektivitas Sumber : Mardiasmo (2018)

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah data penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji data penelitian terdapat ketidaksamaan varians.

Metode Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), modus, maksimum, minimum, dan standard deviasi dari masing-masing variable

b. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, selain itu juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

$$\text{KPKD} = \alpha + b_1 X_1 + e$$

Keterangan :

KPKD = Kinerja Pengelolaan

Keuangan desa

α = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = Standar error

X_1 = Prinsip-prinsip *Good*

Governance

c. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Nilai koefisien determinasi yang kecil atau dibawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghazali, 2014).

Metode Pengujian Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Uji T digunakan untuk tujuan mengetahui pengaruh X terhadap Y secara parsial. Dengan ketentuan nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis meneliti satu variabel independen yaitu Prinsip-prinsip *Good Governance*, apakah berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. Secara statistik dilakukan dengan pengujian secara parsial dengan model regresi dengan menggunakan *software* SPSS 23.

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		62
Normal	Mean	0.000000
Parame	Std.	1.84659747
ters ^{a,b}	Deviation	
Most	Absolute	0.093
Extrem	Positive	0.049
e Diffe	Negative	-0.093
rences		
Test Statistic		0.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}

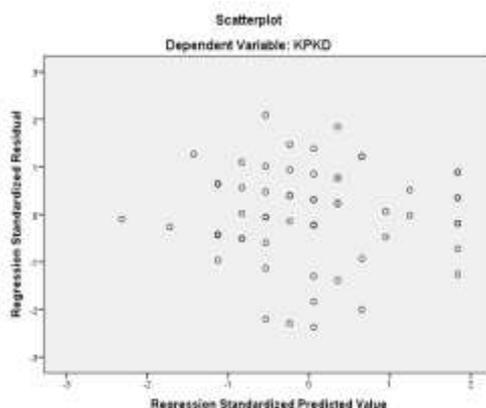
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan Uji *Kolmogrove-Smirnov* terlihat bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

b) Uji Heteroskedastisitas



Dalam gambar (*scatter plot*) terlihat tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
GG	62	34	47	40.81	3.372
KPKD	62	25	33	29.39	1.919
Valid N (listwise)	62				

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *Good Governance* menghasilkan nilai minimum sebesar 34, nilai maximum sebesar 47, nilai mean sebesar 40,81, dan nilai standar deviasi sebesar 3,372.

Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa menghasilkan nilai minimum sebesar 25, nilai maximum sebesar 33, nilai Mean sebesar 29,39, nilai Standar Deviasi 1,919.

b. Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	23.055	2.894		7.965	.000
GG	.155	.071	.273	2.195	.032

a. Dependent Variable: KPKD

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat persamaan regresi linear yaitu:
 $KPKD = 23.055 + 0,155 (GG)$

Diuraikan sebagai berikut:

1. Konstanta (Nilai Mutlak Y) apabila *Good Governance* = 0, maka kinerja pengelolaan keuangan desa = 23.055.
2. Koefisien regresi *Good Governace* sebesar 0,155 yang artinya terdapat hubungan positif antara *Good Governance* dengan kinerja pengelolaan keuangan desa, apabila *Good Governance* naik sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan desa naik sebesar 15,5%, bila variabel independen lainnya konstan.

c. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.273 ^a	.074	.059	1.862

a. Predictors: (Constant), GG

b. Dependent Variable: KPKD

Dari tabel 4.15, diperoleh nilai koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,074. Besarnya angka koefisien determinasi atau nilai R Square adalah 0,074 atau sama dengan 7,4%. Angka tersebut mengandung arti bahwa varians *Good Governance* dapat menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan desa sebesar 7,4%, sedangkan sisanya (100% - 7,4% = 92,6%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Metode Pengujian Hipotesis

a) Uji T (Parsial)

Dengan $n = 62$; $k = 2$; $df = 60$ ($62-2$). Sehingga nilai t-tabel adalah 2,000. Pada penelitian ini uji-t digunakan untuk menguji H_1 .

Berdasarkan hasil uji-t, diperoleh nilai t-hitung sebesar $2,195 >$ dari t-tabel sebesar 2,000, dengan nilai signifikan sebesar 0,032 dimana nilai signifikannya $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima artinya penerapan prinsip *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Pembahasan

a. Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Governance* terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil uji-t, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H_1), dari hasil tersebut diperoleh nilai t-hitung sebesar $2,195 >$ dari t-tabel sebesar 2,000, dengan nilai signifikan sebesar 0,032 dimana nilai signifikannya $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima artinya penerapan prinsip *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan diterapkannya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa membuat kinerja pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa di Kecamatan Lengayang lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Jadi, pada penelitian ini Prinsip *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu, seluruh Nagari yang ada di Kecamatan Lengayang dapat dikatakan memiliki tata kelola pemerintahan yang sangat baik dilihat dari indikator *Good Governance* yang digunakan dimana hasil tersebut dapat dilihat dari hasil analisis statistik deskriptif mengenai jawaban responden.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasrun, dkk (2019) yang menyatakan *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini sesuai pula dengan penelitian Christo Astriandy (2018) yang menyatakan bahwa prinsip *Good Governance* berpengaruh signifikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, dan penelitian ini sesuai dengan penelitian Rino Pandhu Wibowo (2018) yang menyatakan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan prinsip *Good Governance* terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan yaitu Penerapan Prinsip *Good Governance* (X) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai nilai t-hitung sebesar $2,195 >$ dari t-tabel sebesar 2,000, dengan nilai signifikan sebesar 0,032 dimana nilai signifikannya $< 0,05$.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintahan Desa di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, indikator partisipasi pada variabel *Good Governance* mendapatkan skor rendah dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya pada variabel yang sama. Oleh karena itu, indikator partisipasi perlu ditingkatkan lagi pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Lengayang. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya pertimbangan mengenai partisipasi desa, adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas consensus bersama dan bidang-bidang masyarakat juga perlu dijadikan sebagai bagian dalam program desa.
2. Untuk penelitian selanjutnya, variabel prinsip *Good Governance* hanya mampu menjelaskan varian variabel kinerja pengelolaan keuangan desa sebesar 7,4% saja dimana hasil tersebut dikatakan cukup baik karena data ini merupakan data primer atau *cross section*. Sedangkan sisanya menunjukkan bahwa sebesar 92,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian yang tidak diteliti dalam penelitan ini. Untuk itu, sebaiknya peneliti selanjutnya menambah jumlah variabel independen dan sampelnya karena dengan semakin banyak variabel independen dan sampel yang digunakan pada penelitian maka semakin baik pula hasil penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam, 2014. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)* Edisi 4, BPF E UNDIP, Semarang
- Ghozali, Imam, 2016, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8), BPF E UNDIP, Semarang
- Hariwijaya, M. 2017. *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Elmatara
- Ilmar, Aminuddin, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Karianga, Hendra, 2015. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Manguluang, Agussalim, 2015. *Metodologi Penelitian*, CV. Enam Jaya, Padang
- Muhammadong, 2017. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Edukasi Mitra Grafika, Makassar
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta
- Rosidi, Abidarini dan Fajriani, R. Anggraeni, 2013. *Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*, C.V Andi Offset, Yogyakarta
- Sugiyono, 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

- Sugiyono, 2013. *Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta
- Suprihatini, Amin, 2018. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih, Klaten
- Astriandy, Christo, 2018. *Analisis Penerapan Good Government Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Fransisca, Maria, 2017. *Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Hardianti, Siti, 2017. *Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin
- Pandhu Wibowo, Rino, 2018. *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Siringoringo, Elisabeth, 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya*, Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Jurnal

- Nasrun, Muhammad, Dkk, 2019. *Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, Jurnal ekonomi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa
- UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah